



LKjIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR	1
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 8
2.1 RENCANA STRATEGIS	8
2.2 PERJANJIAN KINERJA	1
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 11
3.1 PENGUKURAN KINERJA	11
3.2 ANALISIS KINERJA	12
3.3 FAKTOR KEBERHASILAN	22
3.4 PERMASALAHAN/HAMBATAN	22
3.5 SOLUSI	23
3.6 ANALISIS PROGRAM	24
3.7 REALISASI ANGGARAN	25
3.8 ANALISIS EFISIENSI	25
 BAB IV PENUTUP	 27
4.1 KESIMPULAN	27
4.2 SARAN	28

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1 RENCANA STRATEGIS -----	8
TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA -----	9
TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA -----	11
TABEL 3.2 PENINGKATAN PAD-----	13
TABEL 3.3 TARGET PAD -----	14
TABEL 3.4 TARGET PAJAK DAERAH -----	16
TABEL 3.5 CAPAIAN KINERJA -----	17
TABEL 3.6 REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH -----	18
TABEL 3.7 PREDIKAT KINERJA PERANGKAT DAERAH-----	19
TABEL 3.8 PARTISIPSI ASN DALAM SURVEI SPI-----	20
TABEL 3.9 NILAI AREA PENERIMAAN DAERAH -----	20
TABEL 3.10 PENGELOLAAN MANAJEMEN RESIKO -----	21
TABEL 3.11 ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN -----	24
TABEL 3.12 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN -----	25
TABEL 3.13 ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN -----	25

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat kami selesaikan walaupun dalam bentuk dan isi yang masih jauh dari harapan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan serta untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Daerah dari yang lainnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu kami mengharapkan masukan, saran, pendapat yang sifatnya produktif untuk perbaikan selanjutnya yang lebih baik.

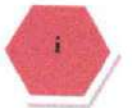
Atas partisipasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala-kepala Sub Bidang serta seluruh staf Lingkup Badan Pendapatan Daerah dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami mengucapkan terima kasih.

Bengkalis, Januari 2026

PIL. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS.



H. KHAIR FAHRIZAL, ST.,M.P.W.K
PEMBINA TK.I
NIP. 19820118 200604 1 003



BAB I PENDAHULUAN

1 1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025, adapun tujuannya adalah :

1. Laporan kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja pemerintah pada setiap tahunnya.
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 47 tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

1.3.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan
- e. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :
- f. Sub Bagian Bidang Pendaftaran; dan
- g. Sub Bagian Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- h. Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :
- i. Sub Bagian Bidang Dana Bagi Hasil; dan
- j. Sub Bagian Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- k. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :
- l. Sub Bagian Bidang Penagihan; dan
- m. Sub Bagian Bidang Keberatan dan Pengurangan;
- n. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :
- o. Sub Bagian Bidang Analisa dan Pendapatan;
- p. Sub Bagian Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan;
- q. Kelompok JF; dan
- r. UPTD.

1.3.2 Tugas dan fungsi serta uraian tugas

1. Kepala

1. Kepala mempunyai tugas Membantu Bupati, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah
2. Kepala dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - s. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah

- t. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Daerah
- u. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pendapatan Daerah
- v. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendapatan Daerah
- w. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pendapatan Daerah
- x. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
- y. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah
- z. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, umum dan kepegawaian.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian rumah tangga Badan Pendapatan Daerah
 - c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset
 - d. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi dan hubungan masyarakat
 - e. Pelaksanaan urusan Hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
3. Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Perencana.
Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan kegiatan dan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dn petunjuk teknis serta

layanan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Sub Bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bidang Pendataan Dan Pendaftaran

1. Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang Pendataan dan Pendaftaran.

2. Susunan Organisasi Bidang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendaftaran.

Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pendaftaran.

b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang Pengolahan Data dan Informasi.

4. Bidang Penerimaan Dan Pembukuan

1. Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penerimaan dan pembukuan.

2. Susunan Organisasi Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil.

Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang dana bagi hasil.

b. Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Bidang Penagihan Dan Keberatan

1. Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang penagihan dan keberatan.
2. Susunan Organisasi Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan.
Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang penagihan.
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan.
Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang keberatan dan pengurangan

6. Bidang Pengendalian Dan Pengembangan

1. Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi bidang pengendalian dan pengembangan.
2. Susunan Organisasi Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Analisa dan Pendapatan.
Sub Bidang Analisa dan Pendapatan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang analisa dan pendapatan.
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan.
Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan fungsi sub bidang pengembangan dan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta membantu Kepala Badan sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

8. Unit Pelaksana Teknis

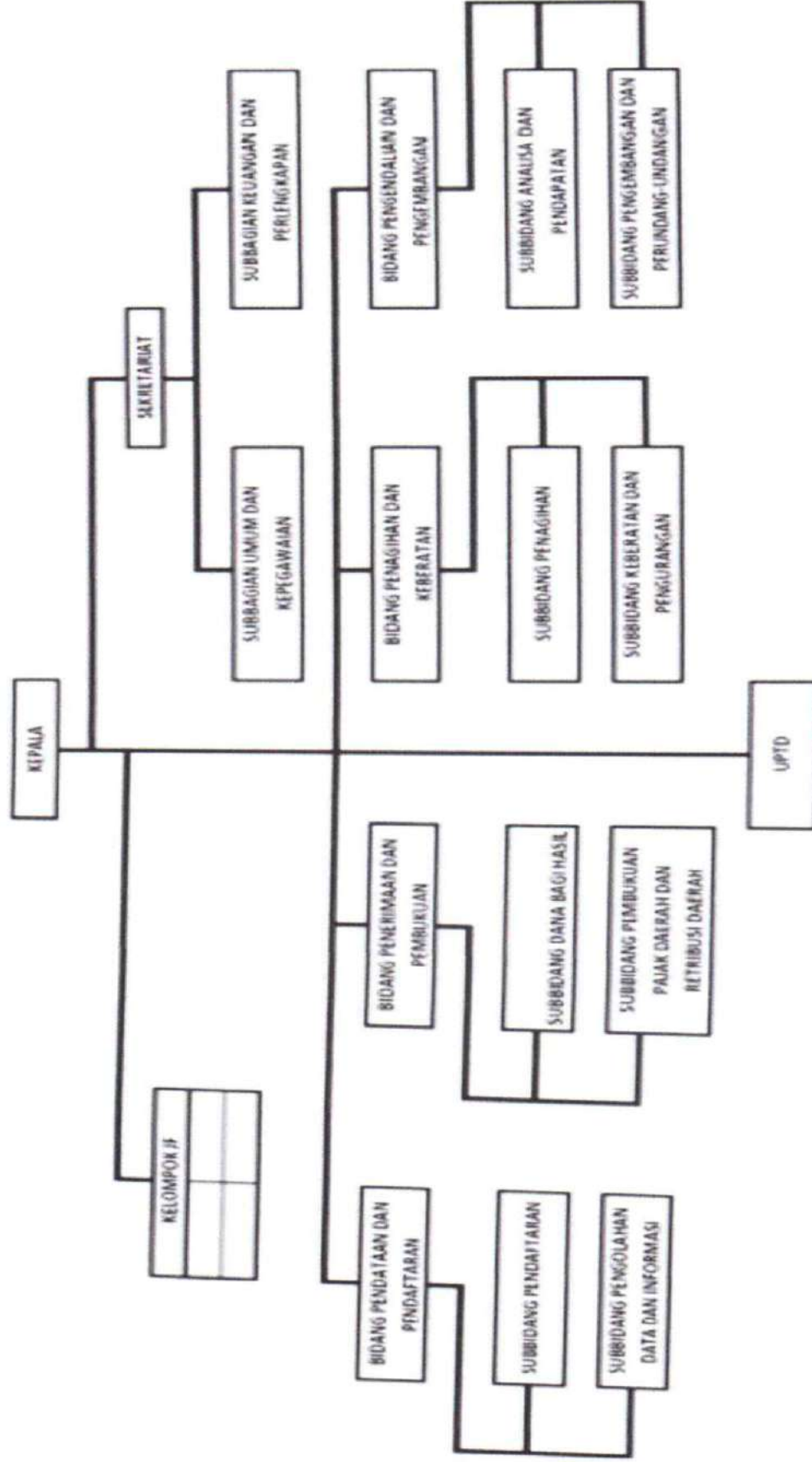
1. Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
2. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu atau sebagai perpanjangan Badan di Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Bengkalis. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. UPT PBB-P2 Sektor Perdesaan dan Perkotaan

UPT PBB-P2 Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian, pemutakhiran data, penagihan, dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah kerjanya. Fungsi UPT meliputi pelayanan administrasi perpajakan seperti penerbitan dan distribusi SPPT, perubahan data wajib pajak, verifikasi lapangan objek pajak.

2. UPT Pendapatan Kecamatan Bathin Solapan
3. UPT Pendapatan Kecamatan Bantan
4. UPT Pendapatan Kecamatan Bukit Batu
5. UPT Pendapatan Kecamatan Siak Kecil
6. UPT Pendapatan Kecamatan Mandau
7. UPT Pendapatan Kecamatan Pinggir yang mengkoordinir Kecamatan Pinggir dan Tualang Muandau
8. UPT Pendapatan Kecamatan Rupert
9. UPT Pendapatan Kecamatan Rupert Utara

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalis



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan melaporkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

2.1 Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 -2026

Tabel 2.1.
Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	PERSENTASE PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH	PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	12,77%	15,75%	16,80%	18,70%	18,70%
		MENINGKATNYA POTENSI PAJAK DAERAH	Persentase Peningkatan Wajib Pajak	-	3	-	-	-	-	-
			Ratio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,44%	11,86%	-	-	-	-	-
		MENINGKATNYA KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu	-	5	-	-	-	-	-
			Jumlah Regulasi Pajak Daerah	2	3	-	-	-	-	-
		MENINGKATNYA PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI	Jumlah Pelayanan Pajak Daerah Secara Online	3	3	-	-	-	-	-
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	Predikat Kinerja Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A	A

- * Target renstra pada tahun 2022
* Perubahan Target renstra tahun 2023-2026

Mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan penyesuaian dan penyempurnaan sasaran kinerja pada Rencana Strategis. Sasaran kinerja yang ditetapkan mencerminkan proyeksi pertumbuhan ekonomi serta estimasi pendapatan yang lebih realistis namun tetap optimis. Perbaikan tersebut mencakup penyesuaian sasaran, indikator, dan target kinerja guna meningkatkan efektivitas

pengukuran kinerja serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Adapun rincian perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Capaian
			2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	16,70%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,5
3	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100,00%
		Nilai Area Penerimaan daerah pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%
4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah	1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani pada Januari 2025 menetapkan empat sasaran strategis dengan lima indikator kinerja, di mana dua sasaran utama menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah, yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk melihat sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Persentase peningkatan PAD mencapai 16,70%, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta perbaikan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 74,5, mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang lebih akuntabel dan transparan.
3. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah mencapai 100%, yang menunjukkan komitmen penuh ASN dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.

- Nilai Area Penerimaan Daerah pada MCP KPK sebesar 85, yang menandakan bahwa sistem pengendalian dan pencegahan korupsi di sektor penerimaan daerah telah berjalan dengan baik.
- Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tersusunnya 2 dokumen peta risiko perangkat daerah, yang menjadi dasar dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan risiko pada pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang buat pada awal tahun anggaran 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3.1 Pengukuran Kinerja

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Capaian	Satuan	Realisasi	Capaian
			2025			
1	2	3	5	5	6	7
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	16,70%	Persentase	14,66%	87,79%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,5	Nilai	75,2	100,94%
3	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100,00%	Persentase	78,22%	78,22%
		Nilai Area Penerimaan daerah pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85	Persentase	63	74,11%
4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil yang cukup baik. Target persentase peningkatan PAD sebesar 16,70%, dengan realisasi sebesar 14,66%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 87,79%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan PAD telah berjalan, namun masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, kinerja yang dicapai tergolong sangat baik. Target nilai akuntabilitas kinerja sebesar 74,5, dengan

realisasi 75,2, sehingga capaian kinerja mencapai 100,94%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada sasaran terwujudnya pencegahan korupsi pada perangkat daerah, terdapat dua indikator kinerja. Indikator persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi 78,22%, sehingga capaian kinerja sebesar 78,22%. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi ASN masih perlu ditingkatkan agar komitmen pencegahan korupsi dapat berjalan secara menyeluruh.

Sementara itu, indikator nilai area penerimaan daerah pada MCP Kopsurgah MCP KPK ditargetkan sebesar 85, dengan realisasi 63, sehingga capaian kinerja mencapai 74,11%. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi pengendalian dan pencegahan korupsi pada sektor penerimaan daerah masih memerlukan penguatan dan perbaikan.

Pada sasaran meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah, target penyusunan 2 dokumen peta risiko perangkat daerah telah tercapai sepenuhnya. Realisasi menunjukkan tersusunnya 2 dokumen, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00%. Hal ini menandakan bahwa penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

3.2 Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan sebagian sasaran telah tercapai bahkan melampaui target, sementara beberapa sasaran lainnya masih memerlukan peningkatan kinerja dan penguatan strategi pelaksanaan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja pada sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil cukup baik. Target persentase peningkatan PAD sebesar 16,70%, dengan realisasi 14,66%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 87,79%. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan PAD telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, namun belum sepenuhnya mencapai target.

Belum optimalnya capaian PAD dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan basis data objek dan subjek pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum merata, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah. Realisasi perhitungan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah sebagai berikut :

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023-2025								
No	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025
1	487.664.529.682,00	614.611.380.100,39	126.03%	1.157.642.410.096,00	35.09%	538.242.832.889.00	472.539.359.219.32	87.79%

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD Tahun 2025}}{\text{Jumlah Target PAD Tahun 2025}} \times 100\%$$

Berdasarkan Tabel diatas, Berdasarkan tabel Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023–2025, kinerja PAD menunjukkan dinamika capaian yang fluktuatif. Pada Tahun 2023, target PAD sebesar Rp487.664.529.682,00 dengan realisasi sebesar Rp614.611.380.100,39, sehingga capaian mencapai 126,03%. kenaikan PAD tersebut didapat dari Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu dana *Participating Interest (PI)* dari PT. Pertamina Hulu Rokan dengan Jumlah Realisasi sebesar 316.861.797.346 atau sebesar 1.179,60 % dari yang ditargetkan sebesar 26.861.797.346,-. Dana *Participating Interest (PI)* dari PT. Pertamina Hulu Rokan yang tidak masuk dalam Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan realisasi dari target yang ditetapkan sebelumnya. Ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam penjadwalan atau pelaksanaan penyaluran dana PI tersebut, yang akhirnya memengaruhi pencapaian target pendapatan daerah pada tahun tersebut.

Selanjutnya pada Tahun 2024, target PAD meningkat signifikan menjadi Rp1.157.642.410.096,00, namun capaian hanya sebesar 35,09%. Rendahnya capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan relatif tinggi dibandingkan dengan potensi riil yang dapat dicapai, sehingga diperlukan evaluasi dalam penetapan target agar lebih realistis.

Pada Tahun 2025, target PAD ditetapkan sebesar Rp538.242.832.889,00 dengan realisasi sebesar Rp472.539.359.219,32, sehingga capaian mencapai 87,79%. Capaian ini menunjukkan perbaikan dibandingkan Tahun 2024, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, kinerja PAD selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa capaian terbaik terjadi pada Tahun 2023, diikuti penurunan signifikan pada Tahun 2024, dan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian target dan perbaikan strategi dalam pengelolaan pendapatan daerah agar lebih selaras dengan kondisi riil dan potensi daerah.

Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam mencapai target PAD pada tahun 2024, di mana realisasi yang ada masih jauh di bawah harapan, kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi penerimaan daerah.

Tabel 3.3.
Target PAD
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan

No	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rencana Strategis			Target Tahunan		
		Kondisi 2023	Nominal Kenaikan	Target	Kenaikan/ penurunan Target dan 2023	Nominal Kenaikan/penurunan	Target
1.	2023	12,86%	45.806.364.771,02	401.998.936.862,96	12,77%	143.250.903.602,00	487.664.529.682,00
2.	2024	15,75%	63.314.832.555,92	465.313.769.418,88	16,10%	669.977.880.414,00	1.157.642.410.096,00
3.	2025	15,98%	74.357.140.353,14	539.670.909.772,02	16,70%	65.703.473.669,68	538.242.832.889,00

Tabel tersebut menggambarkan tren peningkatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta kesesuaiannya dengan realisasi yang dicapai selama

periode Tahun 2023–2025. Berdasarkan data yang tersedia, terlihat adanya tren peningkatan PAD dari tahun ke tahun, baik dari sisi persentase kenaikan maupun nilai nominal penerimaan.

Pada Tahun 2023, peningkatan PAD tercatat sebesar 12,86% dengan nominal kenaikan Rp45.806.364.771,02, sehingga total PAD mencapai Rp401.998.936.862,96. Capaian ini menjadi dasar dalam penetapan target pada tahun berikutnya dan menunjukkan adanya upaya awal optimalisasi pendapatan daerah.

Selanjutnya pada Tahun 2024, target peningkatan PAD ditetapkan sebesar 15,75% dengan nominal kenaikan Rp63.314.832.555,92, sehingga target PAD meningkat menjadi Rp465.313.769.418,88. Dalam target tahunan, persentase peningkatan disesuaikan menjadi 16,10%, dengan target PAD sebesar Rp487.664.529.682,00. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan yang lebih agresif dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2025, peningkatan PAD pada kondisi awal direncanakan sebesar 15,98% dengan nominal kenaikan Rp74.357.140.353,14, sehingga target PAD mencapai Rp539.670.909.772,02. Namun, dalam penetapan target tahunan dilakukan penyesuaian menjadi 16,70% dengan nominal kenaikan Rp65.703.473.669,68 dan target PAD sebesar Rp538.242.832.889,00. Realisasi PAD Tahun 2025 tercatat sebesar Rp472.539.359.219,32, sehingga capaian kinerja mencapai 87,79% dan masih terdapat selisih kurang terhadap target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja peningkatan PAD selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang positif dan meningkat, namun pada Tahun 2025 capaian belum sepenuhnya memenuhi target. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan dan strategi peningkatan PAD telah berjalan dengan baik, masih diperlukan penguatan upaya optimalisasi pendapatan daerah, antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta pengembangan potensi PAD baru agar capaian kinerja dapat lebih optimal pada tahun berikutnya.

Grafik 2.1.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan Target dan Realisasi Rencana Strategis dan Kinerja Tahunan



Grafik Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan perbandingan antara target PAD sesuai Rencana Strategis dan target PAD sesuai kinerja tahunan pada periode Tahun 2023–2025. Perbandingan ini menunjukkan adanya dinamika dan penyesuaian target PAD setiap tahunnya berdasarkan kebijakan strategis dan kondisi riil daerah.

Pada Tahun 2023, target PAD sesuai rencana strategis sebesar Rp487.664.529.682,00, sedangkan target PAD kinerja tahunan sebesar Rp614.611.380.100,39. Dengan demikian, terdapat selisih positif sebesar Rp126.946.850.418,39, di mana target tahunan ditetapkan lebih tinggi dibandingkan target strategis. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan peningkatan target yang lebih optimistis pada level tahunan untuk mendorong akselerasi penerimaan PAD.

Pada Tahun 2024, terjadi selisih yang cukup signifikan. Target PAD sesuai rencana strategis ditetapkan sebesar Rp1.157.642.410.096,00, sementara target PAD kinerja tahunan hanya sebesar Rp368.519.746.541,00. Dengan demikian, terdapat selisih negatif sebesar Rp789.122.663.555,00. Gap yang besar ini mengindikasikan adanya penyesuaian target tahunan yang cukup drastis, yang kemungkinan dipengaruhi oleh evaluasi capaian PAD tahun sebelumnya, kondisi ekonomi daerah, serta pertimbangan realistis terhadap kapasitas penerimaan daerah.

Selanjutnya pada Tahun 2025, target PAD sesuai rencana strategis sebesar Rp539.670.909.772,02, sedangkan target PAD kinerja tahunan sebesar Rp538.242.832.889,00. Selisih antara kedua target tersebut relatif kecil, yaitu sebesar Rp1.428.076.883,02, yang menunjukkan adanya sinkronisasi yang lebih baik antara perencanaan strategis dan penetapan target tahunan.

Secara keseluruhan, analisis selisih target PAD menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara target strategis dan target tahunan pada periode 2023–2024 mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan yang bersifat adaptif terhadap kondisi riil daerah. Sementara itu, semakin kecilnya gap pada Tahun 2025 menandakan perbaikan kualitas perencanaan dan konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan target kinerja tahunan.

Tabel 3.4.
Target Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Indikator	2025		
	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Capaian
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	29,70 %	29,69%	99,96%
	137.835.000.000,00	137.723.436.939,00	

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pada Tahun 2024, Target Pajak Daerah mengalami Peningkatan sebesar 29,70% atau Rp. 32.330.925.000, dari Target Pajak Daerah ditahun 2023 sebesar 105.504.075.000, dan Realisasi sebesar 106.096.057.359,42, untuk melihat jumlah peningkatan/penurunan target dan Realisasi Pajak Daerah dapat di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Peningkatan Pajak Daerah

2024	2025		
Target	Target	Realisasi	Capaian
137.835.000.000,	80,31 %	78,87%	98,21%
	248.532.500.000,00	244.077.423.961,93	

Penetapan target pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp137.835.000.000,00 menjadi dasar perencanaan penerimaan daerah pada tahun berikutnya. Pada Tahun 2025, target pendapatan meningkat signifikan menjadi Rp248.532.500.000,00, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp244.077.423.961,93 dan tingkat capaian kinerja mencapai 98,21%, yang menunjukkan kinerja penerimaan daerah tergolong sangat baik.

Peningkatan target dan realisasi pendapatan tersebut tidak terlepas dari kontribusi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada opsen PKB, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp65.000.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp68.624.634.463,00 atau 105,58%, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp3.624.634.463,00. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan opsen PKB melampaui target yang ditetapkan dan menjadi salah satu faktor utama peningkatan pendapatan daerah.

Sementara itu, pada opsen BBNKB, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp39.400.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp35.888.960.001,00 atau 91,09%, sehingga masih terdapat selisih kurang sebesar Rp3.511.039.999,00. Meskipun realisasi opsen BBNKB belum sepenuhnya mencapai target, penerimaan ini tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Secara umum, implementasi kebijakan opsen PKB dan BBNKB telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pendapatan daerah pada Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian target opsen PKB mampu mengompensasi belum optimalnya penerimaan opsen BBNKB, sehingga secara agregat target pendapatan daerah dapat dicapai dengan sangat baik.

Meskipun demikian, capaian realisasi yang hampir mencapai target menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Ke depan, perlu dilakukan perbaikan pada sistem administrasi, peningkatan edukasi masyarakat, dan penguatan pengawasan untuk memastikan target Pajak Daerah dapat tercapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Grafik 2.2.
Target Pajak Daerah 6 Tahun Terakhir



Sebagai perbandingan target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Target yang ditetapkan pada setiap Tahunnya dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan Target
Pada Rencana Strategis dan Target Kinerja Tahunan

NO.	PENERIMAAN PAJAK DAERAH	TARGET KINERJA TAHUNAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Pajak Daerah 2020	60.500.000.000,00	63.710.380.457,25	105,30 %
2	Pajak Daerah 2021	79.095.000.000,00	82.344.471.212,00	104,11 %
3	Pajak Daerah 2022	89.252.000.000,00	94.317.792.196,00	105,67 %
4	Pajak Daerah 2023	105.504.075.000,00	106.286.443.635,42	100,74 %
5	Pajak Daerah 2024	137.835.000.000,00	137.723.436.939,00	99,92 %
6	Pajak Daerah 2024	248.532.500.000,00	244.077.423.961,93	98,21 %

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam waktu enam tahun terakhir, Realisasi Pajak daerah Melebihi dari target yang ditetapkan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis terus Meningkatkan PAD terutama Pajak Daerah.

2. Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Predikat Kinerja Perangkat Daerah

Predikat Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025, Untuk melihat persentase Capaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.
Predikat Kinerja Perangkat Daerah

Perangkat Daerah	Predikat Hasil Evaluasi Tahun 2023						
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Jumlah	Nilai	Predikat
Badan Pendapatan Daerah	24,60	21,60	12,75	16,25	72,20	75,20	BB

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, nilai pada masing-masing komponen menunjukkan capaian yang relatif konsisten.

Aspek Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 24,60, Pengukuran Kinerja sebesar 21,60, Pelaporan Kinerja sebesar 12,75, dan Evaluasi Internal sebesar 16,25. Akumulasi penilaian tersebut menghasilkan nilai total sebesar 75,20.

Dengan perolehan nilai tersebut, Badan Pendapatan Daerah memperoleh predikat "BB", yang menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik. Peningkatan nilai pada aspek perencanaan dan pelaporan kinerja dibandingkan evaluasi sebelumnya mencerminkan adanya perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada seluruh komponen penilaian secara berkelanjutan agar kualitas akuntabilitas kinerja dapat terus meningkat dan mencapai predikat yang lebih tinggi pada periode evaluasi berikutnya.

3. Sasaran 3

Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

1. Indikator Sasaran Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah

Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah 2025, Untuk melihat persentase Capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI)
internal Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Target Capaian	Satuan	Realisasi	Capaian
		2025			
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100,00%	Persentase	78,22%	78,22%

Sumber : <https://spi.kpk.go.id>

Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah menunjukkan tingkat keterlibatan aparatur sipil negara dalam survei yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur integritas dan risiko korupsi di lingkungan pemerintahan. Pada Tahun 2025, target partisipasi ASN ditetapkan sebesar 100,00%, namun realisasi yang dicapai sebesar 78,22%, sehingga capaian indikator berada pada angka

78,22%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi ASN telah berjalan, masih diperlukan upaya peningkatan keterlibatan seluruh ASN, mengingat hasil SPI menjadi instrumen penting dalam menilai tata kelola pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta sebagai dasar perumusan strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah.

2. Indikator Nilai Area Penerimaan daerah pada MCP Kopsurgah MCP KPK

Untuk Melihat Nilai Area Penerimaan daerah pada MCP Kopsurgah MCP KPK 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Nilai Area Penerimaan daerah pada MCP Kopsurgah MCP KPK

Sasaran	Indikator	Target Capaian	Satuan	Realisasi	Capaian
		2025			
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Nilai Area Penerimaan daerah pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85,00%	Persentase	63,00%	78,22%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Bengkalis

Sasaran Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah diukur salah satunya melalui indikator Nilai Area Penerimaan Daerah pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Kopsurgah KPK. Pada Tahun 2025, target nilai yang ditetapkan sebesar 85,00%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 63,00%, sehingga tingkat capaian indikator tercatat sebesar 78,22%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi pada sektor penerimaan daerah telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Nilai MCP yang belum optimal mengindikasikan masih perlunya penguatan pada aspek tata kelola penerimaan daerah, antara lain dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, transparansi pengelolaan pendapatan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut atas rekomendasi MCP guna meningkatkan kualitas pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

4. Sasaran 4

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

1. Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah mampu

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 3.10.
Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Target Capaian	Satuan	Realisasi	Capaian
		2025			
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwab Sasaran meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah diukur melalui indikator jumlah dokumen peta risiko perangkat daerah. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebanyak 2 dokumen, dan realisasi telah tercapai seluruhnya dengan tersusunnya 2 dokumen peta risiko, sehingga tingkat capaian indikator mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah melaksanakan pengelolaan manajemen risiko secara sistematis melalui proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), guna mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada aspek perencanaan, pemungutan, dan pengelolaan penerimaan daerah, sebagai berikut:

- ✓ Intensifikasi Perubahan Tarif pajak melalui Revisi Peraturan-peraturan yang berlaku.
- ✓ Ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dengan mendata jumlah wajib pajak baru yang melalui sosialisasi/penyuluhan.
- ✓ Mendorong Pengembangan sektor-sektor Potensial yang dapat memberikan kontribusi Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

- ✓ Kondisi sosial masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi.
- ✓ Mengembangkan dan Mengimplementasikan Teknologi Informasi sampai ke daerah terpencil dan Badan Usaha yang berdomisili diluar Kabupaten Bengkalis.
- ✓ Koordinasi dan Komitmen Stackholder antar instansi yang cukup baik.
- ✓ Sosialisasi dan penyuluhan baik terhadap Wajib Pajak, maupun kepada aparat yang mengelola bidang PAD.

3.4 Permasalahan/Hambatan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, terdapat beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada aspek perencanaan, pemungutan, dan pengelolaan penerimaan daerah, sebagai berikut:

- ✓ Basis Data Objek dan Subjek Pajak Belum Sepenuhnya Mutakhir
Data wajib pajak, objek pajak, dan potensi pajak daerah belum sepenuhnya terbaru dan terintegrasi, sehingga masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal.
- ✓ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang Masih Rendah pada Jenis Pajak Tertentu
Sebagian wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, yang berdampak pada keterlambatan dan penurunan realisasi PAD.
- ✓ Keterbatasan Pengawasan dan Penagihan Aktif
Mekanisme pengawasan dan penagihan pajak daerah belum berjalan secara optimal, terutama terhadap wajib pajak dengan tunggakan, sehingga mempengaruhi pencapaian target PAD.
- ✓ Ketergantungan pada Jenis Pajak Tertentu
Struktur PAD masih didominasi oleh beberapa jenis pajak utama, sehingga ketika terjadi penurunan pada sektor tertentu, realisasi PAD secara keseluruhan ikut terdampak.
- ✓ Penyesuaian Target PAD yang Belum Sepenuhnya Berbasis Potensi Riil
Penetapan target PAD pada beberapa periode belum sepenuhnya didasarkan pada analisis potensi riil dan tren penerimaan, sehingga berpengaruh pada tingkat capaian kinerja.

- ✓ Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola PAD
Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur di bidang perpajakan daerah berdampak pada efektivitas pendataan, pelayanan, dan pengawasan pajak daerah.
- ✓ Koordinasi Lintas Perangkat Daerah yang Belum Optimal
Pengelolaan PAD membutuhkan dukungan lintas perangkat daerah, namun koordinasi dan sinkronisasi data serta program masih perlu ditingkatkan agar penggalan potensi PAD lebih efektif.
- ✓ Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak Daerah
Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang berkelanjutan.
- ✓ Kondisi Geografis sangat Luas.

3.5 Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Menyikapi hal tersebut, dalam usaha untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun mendatang, perlu upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut antara lain adalah:

- ✓ Peningkatan Sanksi yang tegas dan memberikan Reward terhadap Wajib Pajak yang Taat membayar pajak.
- ✓ Peningkatan Kompetensi Petugas Pajak.
- ✓ Peningkatan kualitas dan keakuratan data yang dikumpulkan.
- ✓ Membentuk Tim antara Stakeholder yang terlibat dalam proses perpajakan daerah.
- ✓ Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mengoptimalkan proses pelaporan dan pembayaran pajak.
- ✓ Terus melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat baik secara langsung, melalui media sosial dan media elektronik.

3.6 Analisis Program dan Kegiatan

Tabel 3.11.
Analisis Program dan Kegiatan

Sasaran	Indikator Capaian	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	95,56%	92,04%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77,01%	70,70%

Dari tabel tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun anggaran 2024 Memiliki memiliki 2 program, 9 kegiatan, dan 41 sub kegiatan. Namun, yang memberikan dampak secara langsung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan hanya 2 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua kegiatan atau sub kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Meskipun tidak langsung menyumbang pada pencapaian sasaran strategis, keberadaan sub kegiatan ini penting untuk menjaga keberlangsungan operasional baik Sarana dan prasarana yang memadai.

3.7 Realisasi Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun anggaran 2025 telah menganggarkan dana sebesar Rp 47.117.757.078,00 (Empat puluh tujuh milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan.

Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp . 47.117.757.078,00 realisasinya pada tahun anggaran tahun 2025 sejumlah Rp 38.150.665.221,00 atau mencapai 95,73%. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian	Realisasi Capaian		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	95,56 %	7.029.731.209,00	6.470.247.580,00	92,04%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Perangkat Daerah	86,67%	40.088.025.869,00	31.680.417.641,00	79,03%

3.8 Analisis Efisiensi

Tabel 3.13.
Analisis Efisiensi Anggaran

Sasaran	Indikator Capaian	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	95,56 %	92,04%	7,96 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Perangkat Daerah	86,67%	79,03%	20,97 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Secara keseluruhan, Badan Pendapatan Daerah telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mencapai sasaran strategis pada Tahun Anggaran berjalan. Sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah mencapai kinerja sebesar 95,56 persen dengan realisasi anggaran 92,04 persen dan tingkat efisiensi 7,96 persen, yang menunjukkan capaian kinerja tinggi dengan penggunaan anggaran yang efisien. Sementara itu, sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mencapai kinerja sebesar 86,67 persen dengan realisasi anggaran 79,03 persen dan tingkat efisiensi 20,97 persen, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan hemat anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja dan anggaran telah berjalan selaras dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yang disusun ini merupakan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis atas pencapaian penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2025. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan Evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat tergambarkan hasil capaian yang telah ditargetkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja suatu instansi pemerintah dan juga sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Disamping untuk mengetahui gambaran kinerja, juga dapat menjadi bahan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2025 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya.

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis diperoleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum sudah mencapai hasil yang ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Permasalahan yang dihadapi selama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus dicarikan solusi yang tepat guna menjawab permasalahan yang ada.
3. Anggaran / Dana sebagai pendukung yang tersedia dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan harus merealisasikan kebijakan yang dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan langkah-langkah korektif dan antisipatif untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- ☐ Mengimplementasikan strategi dan program untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penagihan dan pemeriksaan pajak daerah bekerjasama dengan pihak terkait.
- ☐ Mendorong pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
- ☐ Mengembangkan dan mengimplementasi teknologi informasi sampai ke daerah terpencil dan Badan Usaha yang berdomisili di luar Kabupaten Bengkalis.
- ☐ Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2024 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.

Bengkalis, Januari 2026

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

H. KHAIRI FAHRIZAL, ST.,M.P.W.K
PEMBINA TK.I
NIP. 19820118 200604 1 003

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yang disusun ini merupakan Pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis atas pencapaian penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2025. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam melakukan Evaluasi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat tergambarkan hasil capaian yang telah ditargetkan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja suatu instansi pemerintah dan juga sebagai bahan evaluasi guna melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih baik lagi. Disamping untuk mengetahui gambaran kinerja, juga dapat menjadi bahan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2025 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja ditahun berikutnya.

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis diperoleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum sudah mencapai hasil yang ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Permasalahan yang dihadapi selama dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis harus dicarikan solusi yang tepat guna menjawab permasalahan yang ada.
3. Anggaran / Dana sebagai pendukung yang tersedia dalam kegiatan sebagaimana diprogramkan harus merealisasikan kebijakan yang dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan langkah-langkah korektif dan antisipatif untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

- ☐ Mengimplementasikan strategi dan program untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penagihan dan pemeriksaan pajak daerah bekerjasama dengan pihak terkait.
- ☐ Mendorong pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
- ☐ Mengembangkan dan mengimplementasi teknologi informasi sampai ke daerah terpencil dan Badan Usaha yang berdomisili di luar Kabupaten Bengkalis.
- ☐ Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 yang dapat kami susun sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2024 yang juga merupakan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025.

Bengkalis, Januari 2026

Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,



H. KHAIRO FAHRIZAL, ST.,M.P.W.K
PEMBINA TK.I
NIP. 19820118 200604 1 003

LAMPIRAN LKjIP

- 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025**
- 2. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN
2025**
- 3. POHON KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025**

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
					2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	PERSENTASE PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	16,70%	Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 x 16,70 %	Kepala Badan
2	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,5	Evaluasi Tim SAKIP Kabupaten Bengkalis	Hasil Evaluasi Tim SAKIP Kabupaten Bengkalis	Kepala Badan

Bengkalis, Januari 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS


SYAHRI DDIN, SH, MM
Pembantu, TK. I
19730105 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAHRUDDIN, SH.MM**
NIP : 19730105 199703 1 005
Pangkat/Golongan : PEMBINA TK. I (IV/b)
Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **KASMARNI, S.Sos, MMP**
Jabatan : **BUPATI BENGKALIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkalis, Januari 2025

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI, S.Sos, MMP

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

SYAHRUDDIN, SH.MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19730105 199703 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN
			2025
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	16,70%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,50
3	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
		Nilai Area Penerimaan Daerah pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%
4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 33.490.489.450,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 8.150.988.062,-	APBD

Bengkalis, Januari 2025

BUPATI BENGKALIS,

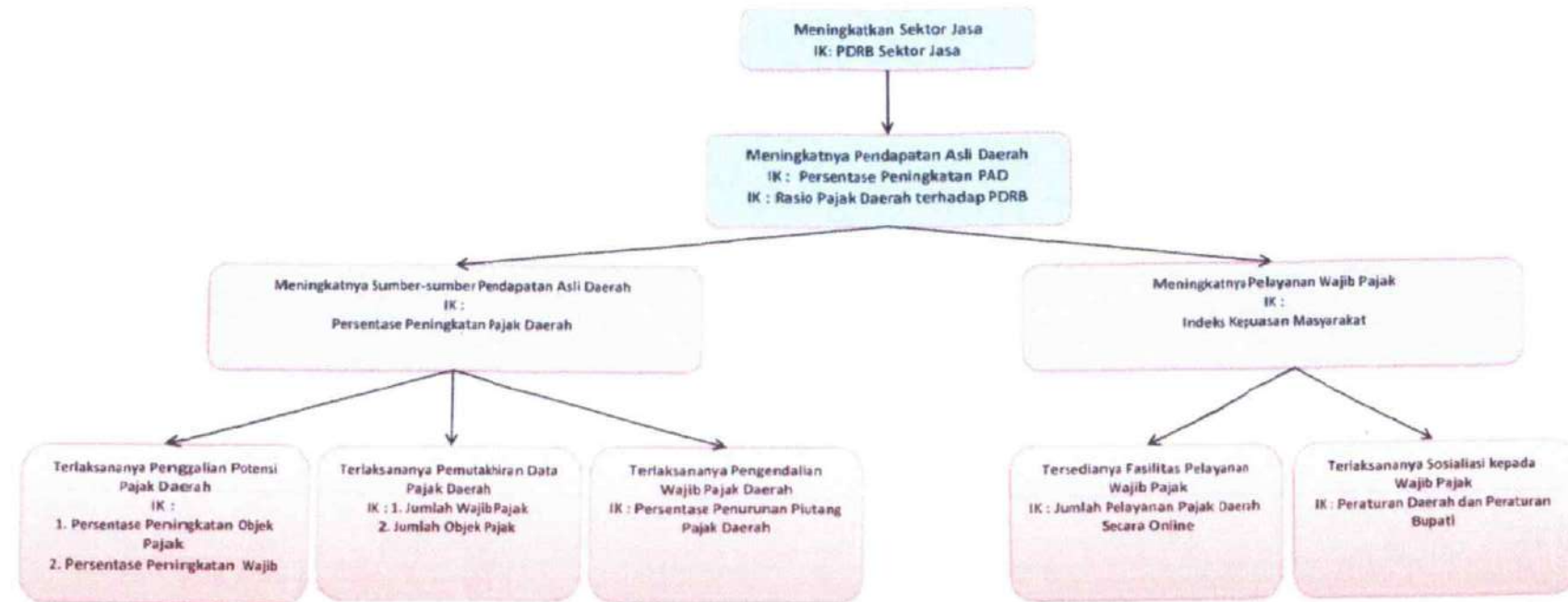


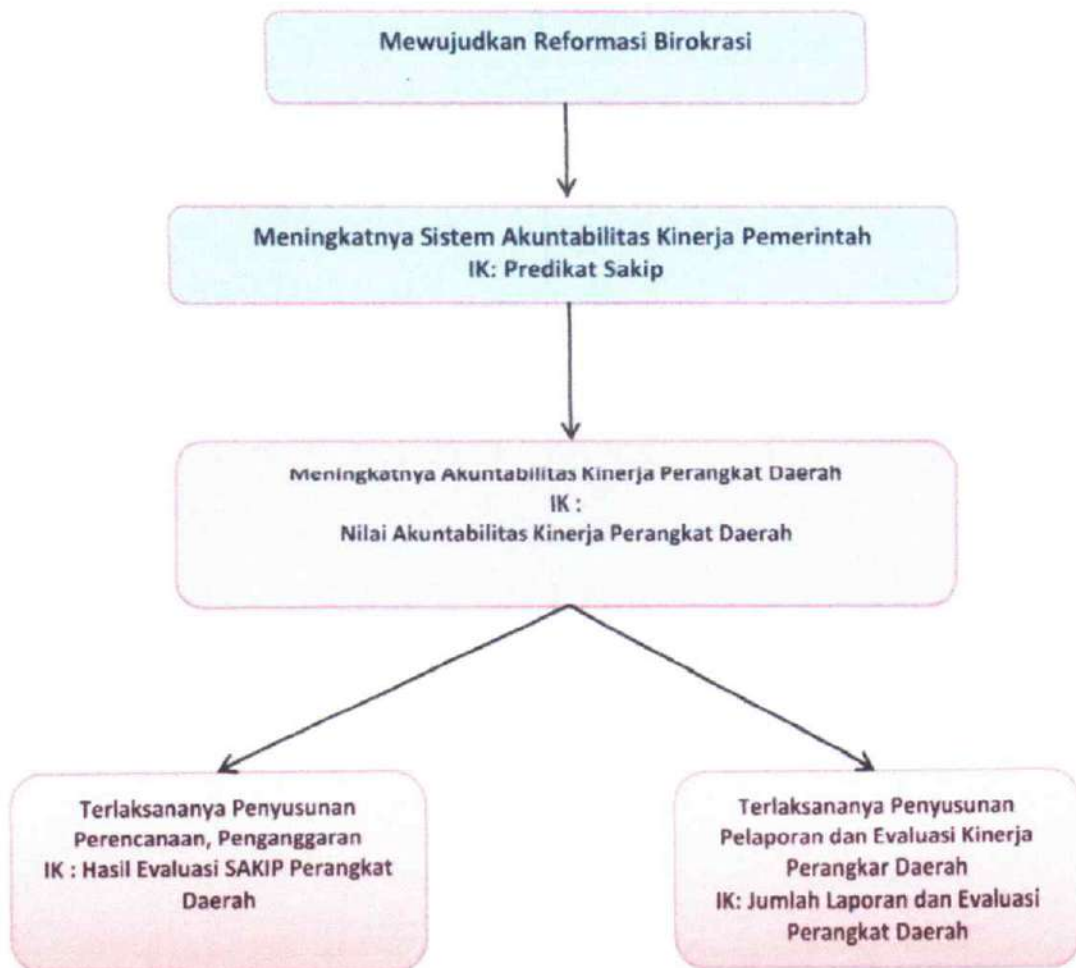
KASMARNI, S.Sos, MMP

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



SYAHRUDDIN, SH.MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19730105 199703 1 005







**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

JALAN JENDERAL SUDRIMAN NOMOR 22 BENGKALIS
WWW.BAPENDA.BENGKALISKAB.GO.ID